

Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka)**

**Wulan Riyadi dan Ani Fitriani**

**Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka**

Email : wulanriyadi@unma.ac.id

Email : anifitriani120@gmail.com

**ABSTRAK**

Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) nya selalu meraih tingkat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan IHPS 1 Tahun 2013 Kabupaten Majalengka mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2008-2012. Alasan BPK memberikan opini tersebut dikarenakan terdapat kelemahan pada sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan. Namun, pada tahun 2013-2019 Kabupaten Majalengka mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan pendekatan analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang berjumlah 84 orang. Pengujian instrumen penelitian dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi, uji kelayakan model dan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS versi 21.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata Kunci** : kualitas sumber daya manusia; pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern; nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah;

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan sektor publik di Indonesia ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dipusat maupun daerah. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya laporan keuangan daerah harus diaudit dalam hal ini oleh BPK agar mendapatkan penilaian mengenai laporan keuangan yang disajikan. Hal ini diperlukan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. BPK dalam hal ini memberikan 4 macam opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Dea Audrya, 2020).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Penyajian Laporan Keuangan (Lampiran I.02 : par. 14-15)

menjelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah yaitu masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investor, pinjaman dan pemerintah.

Kemampuan sumber daya manusia yang memadai menjadi salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang sangat berperan dalam menjamin keberlangsungan suatu organisasi. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan, maka dalam penyusunan laporan keuangan harus disusun oleh sumber daya yang kompeten di bidang sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah (Choiriyah, 2017).

Teknologi informasi juga diduga dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen, jurnal, buku besar hingga menjadi suatu laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi laporan keuangan. Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, pimpinan instansi pemerintah

Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya (Estiyanti & Ardyanti, 2017). Mengingat bahwa salah satu tujuan pengendalian intern adalah keandalan pelaporan keuangan yang artinya pengendalian intern memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini mengambil objek penelitian pada pemerintah Kabupaten Majalengka. Berdasarkan IHPS 1 Tahun 2013 Kabupaten Majalengka mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2008-2012. Alasan BPK memberikan opini tersebut dikarenakan terdapat kelemahan pada sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan. Berdasarkan data penyerahan LHP LKPD TA 2013 Kabupaten Majalengka meraih opini WTP untuk pertama kalinya. Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Majalengka dari tahun 2014-2018 yang berdasarkan IHPS 1 Tahun 2019 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah Kabupaten Majalengka kembali berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019. (Eki Yulianto, 2020)

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka)”**.

### **Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Bagaimana pengaruh pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris tentang bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris tentang bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris tentang bagaimana pengaruh pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

### Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) diantara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. Hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih individu yang disebut *principal* menyewa individu atau organisasi lain yang disebut sebagai *agent* (Wahyudi & Widyawati, 2019). Teori keagenan akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan dan berfokus pada persoalan ketimpangan/asimetri informasi antara pengelola (*agent*) dan publik (*principal*).

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. (Sri Wahyuni Nur, 2015)

Hubungan antara *principal* dan *agent* dapat mengarah pada ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena *agent* berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan *asymmetrical information* yang dimilikinya akan mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Dalam kondisi tersebut *agent* dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan

(Sulistiyoratih & Riharjo, 2019). Sehingga, informasi tersebut berpotensi tidak bernilai dan dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan.

### Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang sudah dibekali dengan pendidikan serta pengalaman yang cukup khususnya dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah (Wahyudi & Widyawati, 2019).

Menurut Caecilia Henny Setya Wati (2017) terdapat 3 indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yaitu :

1. Pendidikan
2. Pelatihan
3. Pengalaman

### Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugas, pengukurannya berdasarkan frekuensi pengguna dan diversitas aplikasi yang dijalankan (Caecilia Henny Setya Wati, 2017).

Menurut Sally Paulina Sandanafu dan Mis Fertyno Situmeang (2018) terdapat 7 indikator untuk mengukur pemanfaatan teknologi informasi yaitu :

1. Memiliki perangkat komputer
2. Memiliki dan memanfaatkan jaringan internet
3. Mengadakan proses akuntansi yang terkomputerisasi
4. Menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Adanya laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi
6. Adanya pemeliharaan peralatan
7. Adanya perbaikan peralatan yang rusak/usang

### Pengendalian Intern

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Sally Paulina Sandanafu dan Mis Fertyno Situmeang (2018) terdapat 7 indikator yang mempengaruhi pengendalian intern yaitu :

1. Menyelenggarakan sistem dan prosedur akuntansi yang memadai meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset, prosedur akuntansi selain kas
2. Memiliki daftar rekening (*chart of account*)
3. Transaksi didukung oleh : otorisasi pihak yang berwenang, bukti yang valid dan sah, dicatat dalam buku catatan akuntansi
4. Memiliki catatan akuntansi yang *up to date*
5. Adanya *review/pemeriksaan* laporan keuangan
6. Sistem akuntansi yang ada dapat dilakukan *audit/transaction trail*
7. Ada pemisahan wewenang

### Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid dan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan

sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan (Estiyanti & Ardyanti, 2017).

Menurut Caecilia Henny Setya Wati (2017) terdapat 6 indikator yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu :

1. Nilai balikan
2. Nilai prediktif
3. Ketepatan waktu
4. Keterujian
5. Keterandalan
6. Keterbandingan

### Kerangka Pemikiran

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama. Penyusunan dan pelaporan keuangan akan lebih efektif dan efisien jika ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai. selain itu, dengan adanya pengendalian intern selaku pengawas intern diharapkan dapat membantu dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan andal dan relevan.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H<sub>2</sub> : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H<sub>3</sub> : Pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 56 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Majalengka. Teknik penentuan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh penulis, kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu :

1. SKPD Kabupaten Majalengka meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kantor.
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada SKPD Kabupaten Majalengka.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan bendahara pada SKPD Kabupaten Majalengka.
4. SKPD Kecamatan tidak termasuk kepada sampel dan responden yang digunakan dengan asumsi bahwa tidak termasuk sebagai instansi teknis pemerintah daerah.

Sampel penelitian ini yaitu 28 SKPD dengan total responden sebanyak 84 orang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas Data

Menurut Imam Ghozali (2016:154) mengemukakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam bentuk model regresi, variabel pengganggu residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas data menggunakan aplikasi SPSS 21. Uji normalitas data dilakukan dengan analisis statistik atau *Kolmogorov-Smirnov Test* (K-S), uji grafik histogram dan grafik P-Plot. Hasil dari uji tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Hasil Uji Normalitas Data**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3320.83764226
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.056
	Negative	-.121
Kolmogorov-Smirnov Z		.983
Asymp. Sig. (2-tailed)		.288

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Output SPSS 21, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Kolmogorov-*

*Smirnov Test Z* adalah sebesar 0,983 dengan nilai *Asymp. Sig* (2-tailed)

Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

sebesar 0,288 atau lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

### Uji Multikolenieritas

Uji multikolenieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen.

**Tabel 1.2**  
**Hasil Uji Multikolenieritas**

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1 (Constant)	-1787.858	3973.673		-.450	.654		
Kualitas Sumber Daya Manusia	.289	.141	.143	2.045	.045	.772	1.296
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.310	.116	.259	2.670	.010	.402	2.488
Pengendalian Intern	.630	.104	.583	6.063	.000	.410	2.439

a. Dependent Variable: Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : Hasil Output SPSS 21, 2021

Berdasarkan hasil uji multikolenieritas dengan menggunakan SPSS 21 pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* diketahui setiap variabelnya yaitu kualitas sumber daya manusia 0,772, pemanfaatan teknologi informasi 0,402 dan pengendalian intern 0,410 lebih dari 0,10. Hasil output untuk nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada masing-masing variabel berjumlah kurang dari 10 yaitu kualitas sumber daya manusia 1.296 < 10, Pemanfaatan Teknologi Informasi 2.488 < 10 dan Pengendalian Intern 2.439 < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami multikolenieritas antar variabel independen dalam model regresi.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil perhitungan analisis regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.2. Berdasarkan output SPSS 21, maka persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = -1787,858 + 0,289X_1 + 0,310X_2 + 0,630X_3 + \varepsilon$$

Persamaan regresi linear berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut :

- Nilai konstanta sebesar -1787,858 dan bertanda negatif. Artinya jika Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern bernilai 0, maka Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar -1787,858.
- Nilai koefisien regresi Kualitas Sumber Daya Manusia ( $X_1$ ) sebesar 0,289 dan bertanda positif. Artinya, bahwa setiap peningkatan Kualitas

Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

Sumber Daya Manusia maka akan meningkatkan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sebaliknya, bahwa setiap penurunan Kualitas Sumber Daya Manusia maka akan menurunkan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (bernilai 0).

- c. Nilai koefisien regresi Pemanfaatan Teknologi Informasi (X<sub>2</sub>) sebesar 0,310 dan bertanda positif. Artinya, bahwa setiap peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi maka akan meningkatkan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sebaliknya, bahwa setiap penurunan Pemanfaatan Teknologi Informasi

maka akan menurunkan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (bernilai 0).

- d. Nilai koefisien regresi Pengendalian Intern (X<sub>3</sub>) sebesar 0,630 dan bertanda positif. Artinya, bahwa setiap peningkatan Pengendalian Intern maka akan meningkatkan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sebaliknya, bahwa setiap penurunan Pengendalian Intern maka akan menurunkan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (bernilai 0).

**Tabel 1.3**  
**Hasil Analisis Koefisien Determinasi**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error				Beta	Zero-order	Partial
1 (Constant)	-1787.858	3973.673		-.450	.654			
Kualitas Sumber Daya Manusia	.289	.141	.143	2.045	.045	.518	.251	.126
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.310	.116	.259	2.670	.010	.769	.321	.164
Pengendalian Intern	.630	.104	.583	6.063	.000	.843	.610	.373

a. Dependent Variable: Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : Hasil Output SPSS 21, 2021

- 1. Berdasarkan tabel 1.3 diperoleh nilai *Zero Order Correlation* variabel kualitas sumber daya manusia (X<sub>1</sub>) sebesar 0,518, selanjutnya dilakukan perhitungan sebagai berikut :  
KD = r<sup>2</sup> x 100

$$= 0,518 \times 100$$

$$= 26,83\%$$

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi variabel kualitas sumber daya manusia (X<sub>1</sub>) terhadap nilai

Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) adalah sebesar 26,83%.

- Berdasarkan tabel 1.3 diperoleh nilai *Zero Order Correlation* variabel pemanfaatan teknologi informasi (X<sub>2</sub>) sebesar 0,769, selanjutnya dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 KD &= r^2 \times 100 \\
 &= 0,769 \times 100 \\
 &= 59,14\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi variabel pemanfaatan teknologi informasi (X<sub>2</sub>) terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) adalah sebesar 59,14%.

- Berdasarkan tabel 1.3 diperoleh nilai *Zero Order Correlation* variabel pengendalian intern (X<sub>3</sub>)

sebesar 0,843, selanjutnya dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 KD &= r^2 \times 100 \\
 &= 0,843 \times 100 \\
 &= 71,06\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi variabel pengendalian intern (X<sub>3</sub>) terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y) adalah sebesar 71,06%.

### Uji kelayakan Model (Uji F)

Uji F (Uji Kelayakan Model) dilakukan untuk melihat apakah model yang dianalisis memiliki tingkat kelayakan model yang tinggi yaitu variabel-variabel yang digunakan model mampu untuk menjelaskan fenomena yang dianalisis.

**Tabel 1.4**  
**Hasil Uji Kelayakan Model**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2333859696.43	3	777953232.144	67.288	.000 <sup>b</sup>
Residual	716817572.007	62	11561573.742		
Total	3050677268.43	65			

a. Dependent Variable: Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Pengendalian Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sumber : Hasil Output SPSS 21, 2021

Berdasarkan tabel 1.4 diperoleh nilai F<sub>hitung</sub> sebesar 67,288 lebih besar dari nilai F<sub>tabel</sub> yaitu sebesar 2,75 serta nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, artinya model yang dianalisis yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern mampu untuk menjelaskan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### Uji Hipotesis

#### Uji Parsial (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan tabel 1.3 bahwa dapat dijelaskan hasil pengujian parsial

untuk masing-masing variabel independen sebagai berikut :

1. Hasil analisis uji t untuk variabel kualitas sumber daya manusia ( $X_1$ ) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,045  $>$   $t_{tabel}$  sebesar 1,998, maka  $H_0$  ditolak serta nilai signifikansi 0,045  $<$  0,05 artinya kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Hasil analisis uji t untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi ( $X_2$ ) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,670  $>$   $t_{tabel}$  sebesar 1,998, maka  $H_0$  ditolak serta nilai signifikansi 0,010  $<$  0,05, artinya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Hasil analisis uji t untuk variabel pengendalian intern ( $X_3$ ) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,063  $>$   $t_{tabel}$  sebesar 1,998. Maka  $H_0$  ditolak serta nilai signifikansi 0,000  $<$  0,05, artinya pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat dibuktikan kebenarannya.

Hasil penelitian ini, bahwa dari sisi kualifikasi sebagian besar staf sub bagian keuangan/akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Selain itu, para staf juga ikut serta dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah guna menunjang kemampuan dalam bekerja, bahkan pada staf sub bagian keuangan/akuntansi memiliki pengalaman yang cukup lama dalam bekerja sehingga mengetahui dan memahami peraturan-peraturan keuangan terkait dan mampu bekerja secara professional.

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat dibuktikan kebenarannya.

Hasil penelitian ini, bahwa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka telah didukung dengan sarana teknologi informasi yang memadai dari sisi *software* dan jaringan komunikasi. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara terkomputerisasi guna mengurangi risiko terjadinya kesalahan dalam pengolahan data, serta dilakukan pemeliharaan secara teratur sehingga peralatan yang dimiliki dalam kondisi baik, siap pakai dan tidak mudah rusak

Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kerja.

### **Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan analisis menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat dibuktikan kebenarannya.

Hasil penelitian ini, bahwa lingkungan pengendalian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sudah baik dengan terdapatnya struktur organisasi yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan, setiap transaksi diselenggarakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan dan dilakukan sesuai dengan otorisasi dari pihak yang berwenang dengan disertai bukti transaksi yang valid dan sah yang dicatat dalam buku catatan akuntansi yang dijaga untuk tetap *up to date*.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka)” adalah sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Artinya menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia yang

digunakan maka semakin baik pula nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Artinya menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan maka semakin baik pula nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Artinya menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian intern yang diterapkan maka semakin baik pula nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka)”, maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan yang mudah-mudahan bermanfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Sebaiknya, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dapat menghimpun dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelatihan-pelatihan guna menunjang kemampuan dalam bekerja yang dapat bersumber dari lain-lain PAD yang sah, misalnya hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sebaiknya, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka

Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

dapat lebih memperhatikan kondisi dari peralatan atau barang yang dimiliki dengan membersihkan barang secara teratur terutama setelah barang tersebut digunakan, memperhatikan cara penyimpanan, menyimpan kembali barang yang telah digunakan pada tempat semula dan mengoperasikan peralatan atau barang sesuai dengan petunjuk atau aturan pakainya, sehingga peralatan yang dimiliki akan lebih terpelihara dengan baik, lebih mudah untuk mendeteksi dan mendata apabila terdapat peralatan yang rusak.

- Sebaiknya, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dapat melakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kecurangan serta bekerja lebih professional dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013. <http://www.bpk.go.id/ihips> Diakses pada 31 Oktober 2020.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2019. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019. <http://www.bpk.go.id/ihips> Diakses pada 31 Oktober 2020.
- Basnawi Choiriyah. 2017. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Clinic Center Oleh Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (UPT-LKPD) Jawa Timur. *Kebijakan dan Manajemen*

*Publik*. Vol. 5 No. 3. Terdapat pada : <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp3e90c5852cfull.pdf>.

- Caecilia Henny Setya Wati. 2017. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*. Vol. VIII No.1 P-ISSN 2085-8779 E-ISSN 2354-7723.
- Dea Audrya Anggraeni. 2020. Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD se-Kabupaten Majalengka). *Skripsi*. Majalengka : Universitas Majalengka.
- Eki Yulianto. 2020. Pemkab majalengka kembali berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK-RI. <https://jabar-tribunnews-com> Diakses pada 3 November 2020.
- Ermiyati Sulistyoratih dan Ikhsan Budi Riharjo. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 8 No. 7. e-ISSN 2460-0585.
- Humas bpk. 2014. Penyerahan LHP LKPD TA 2013. <https://jabar.bpk.go.id/penyerahan-khp-lkpd-ta-2013-4/> Diakses pada 3 November 2020.
- Imam Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Edisi Ke-8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Tahun 2021	Vol. 2	Nomor 2	Periode Agustus - Februari	ISSN : 2721- 060X
------------	--------	---------	----------------------------	-------------------

- Lilik Wahyudi dan Dini Widyawati. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 8 Nomor 6. e-ISSN 2460-0585.
- Ni Made Estiyanti dan Anak Agung Ayu Puteri Ardyanti. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Efektivitas Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi*. Vol. 23 No. 2. P-ISSN 2301-8292 E-ISSN 2622-1489.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sally Paulina Sandanafu dan Mis Fertyno Situmeang. 2018. Pengaruh Kapasitas SDM, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Maneksi*. Vol.7 No. 2.
- Sri Wahyuni Nur. 2015. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Akuntabilitas Publik Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintahan Kabupaten Maros. *Jurnal Salewangang*. Vol. 9 No.1.